



► **DUNIA PENDIDIKAN**

Beleid Dibikin, Gratifikasi Susah Hilang

*Andreas Yuda Pramono, Jumali,
& Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com*

SLEMAN—Dinas pendidikan di sejumlah daerah di DIY sudah mengantisipasi praktik gratifikasi di dunia pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Sri Adi Marsanto, mengaku orang tua murid atau komite orang tua sering memiliki inisiatif untuk memberi barang dalam wujud bermacam-macam kepada guru. Meski pemberian barang ini dapat dilihat sebagai wujud budaya ketimuran, ada potensi perubahan niat menjadi gratifikasi. "Contoh ketika kelulusan atau kepala sekolah ganti. Banyak sekali pemberian barang yang justru diinisiasi komite sekolah atau orang tua murid. Justru inisiatif orang tua mau memberi kenang-kenangan," kata Adi dihubungi, Selasa (29/4).

Beleid Dibikin,...

Disdik bersama perangkat daerah terkait terus melakukan sosialisasi mengenai gratifikasi di lingkungan pendidikan. Selain guru, komite orang tua juga menjadi sasaran sosialisasi. Disdik berharap ekosistem pendidikan dapat terbangun secara baik-positif tanpa ada unsur-unsur gratifikasi.

Bupati Sleman dan Kepala Disdik Sleman juga telah mengeluarkan surat edaran yang di dalamnya memuat upaya pencegahan gratifikasi. Masyarakat juga bisa membuat aduan melalui akun *Instagram* Dinas Pendidikan Sleman dan *lapor.slemankab.go.id*. Pelaporan menjadi lebih mudah.

Disinggung terkait dengan standar operasional prosedur di lingkungan pendidikan, Adi mengaku tidak ada yang secara khusus dibuat untuk mencegah gratifikasi.

"Sulit juga mendeteksi gratifikasi dari orang tua ke guru. Bisa juga kah memberi barang ketika berada di rumah. Pemantauan sulit juga," katanya.

Adi mengaku tidak ada laporan sepanjang 2024 dan belum ada laporan selama triwulan I 2025. Apabila ada laporan, Disdik akan melakukan klarifikasi dan verifikasi. Setelah itu, Disdik akan memberi jawaban atas tahapan yang telah dilakukan.

Tindakan serupa juga sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul.

Sekretaris Disdikpora Bantul Titik Sunarti Widyarningsih mengatakan, telah ada Peraturan Bupati Bantul No.12/2021 yang diperbarui dengan Peraturan Bupati No.40/2023. Aturan ini mewajibkan pegawai negeri dan

penyelenggara negara menjadi teladan dengan tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. "Selain itu ada fakta integritas untuk semua kepala satuan pendidikan yang diangkat, termasuk pembekalannya," kata Titik.

Termasuk, kata dia, apa yang harus dilakukan ketika menjadi pimpinan satuan pendidikan. Ada larangan dalam menggunakan kewenangan, dan soal larangan meminta pungutan kepada orang tua siswa dan pihak lainnya.

Selain itu, Disdikpora Bantul juga terus mengoptimalkan sosialisasi kepada semua satuan pendidikan dan semua guru. Disdikpora juga memiliki pembinaan melalui dewan pendidikan kepada komite sekolah. Sehingga ketika komite sekolah yang menjadi penggal sumbangan sumber dana untuk satuan pendidikan dipayungi oleh hukum.

Rawan saat PPDB

Di Kota Jogja, Disdikpora setempat menilai gratifikasi rawan terjadi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Karena itu, Disdikpora Kota Jogja meminta orang tua segera melapor ketika ada dugaan tindakan tersebut.

Kepala Disdikpora Kota Jogja, Budi Santosa Asrori, menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir, gratifikasi rawan terjadi selama proses PPDB. Dalam proses PPDB, beberapa sekolah meminta orang tua murid untuk membeli buku atau seragam di sekolah.

Meski begitu, menurut Budi, kasus tersebut tidak terjadi di Kota Jogja pada PPDB tahun

lalu. Dia pun menekankan orang tua dapat memberikan sumbangan yang sifatnya tidak wajib dan tidak memberatkan.

"Seluruh biaya [pendidikan] sudah ditanggung pemerintah. Kami mencukupkan pembiayaan pendidikan di jenjang SD dan SMP negeri dari [dana] Pemerintah Pusat dan daerah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah [BOS] dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah [Bosda]," katanya.

Menjelang Tahun Ajaran Baru, Budi pun mendorong agar orang tua murid segera melapor ketika terjadi dugaan pungutan di sekolah. "[Ketika ada dugaan gratifikasi] Akan langsung ditindaklanjuti. Kami berikan pembinaan dan [meninjau] sejauh mana ketaatan [sekolah untuk memperbaiki manajemen sekolah] pelaporan tersebut," katanya.

Ekosistem Pendidikan

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, mengatakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan seharusnya terus naik dari tahun ke tahun.

Penurunan skor secara serempak terhadap tiga dimensi baik karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, maupun tata kelola pendidikan, menunjukkan kualitas ekosistem pendidikan Indonesia yang memburuk.

"Pendidikan kan menjadi kompas moral yang menunjukkan karakter suatu bangsa. Kualitas pendidikan sangat menentukan. Skor SPI 2024 turun, artinya harapan untuk punya bangsa yang bersih dan berintegritas masih jauh," kata Zaenur.

Dia memberi saran agar ada pengawasan internal dan eksternal terhadap satuan pendidikan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005